

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GONDANG
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KECAMATAN GONDANG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Gondang,
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT GONDANG

2018

IDA SHOBIHATIN,AP,M.Si.

Pembina

NIP.19570116 199412 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5. Penentuan Isu Isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
5.1 Strategi	40
5.2 Kebijakan	40
BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN	42

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
	7.1. Indikator Kinerja Utama	51
	7.2. Indikator Kinerja Kunci	53
BAB VIII	PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Gondang Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Gondang Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Gondang Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Gondang Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Gondang Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Gondang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Gondang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Jawa Timur;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- s. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
- bb. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Nganjuk Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 49-2 Seri E);
- ee. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gondang ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Gondang guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gondang ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GONDANG

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Gondang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondang
- 2.4 Tantangan dan Peluang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
INDIKATIF**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GONDANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gondang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Gondang.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

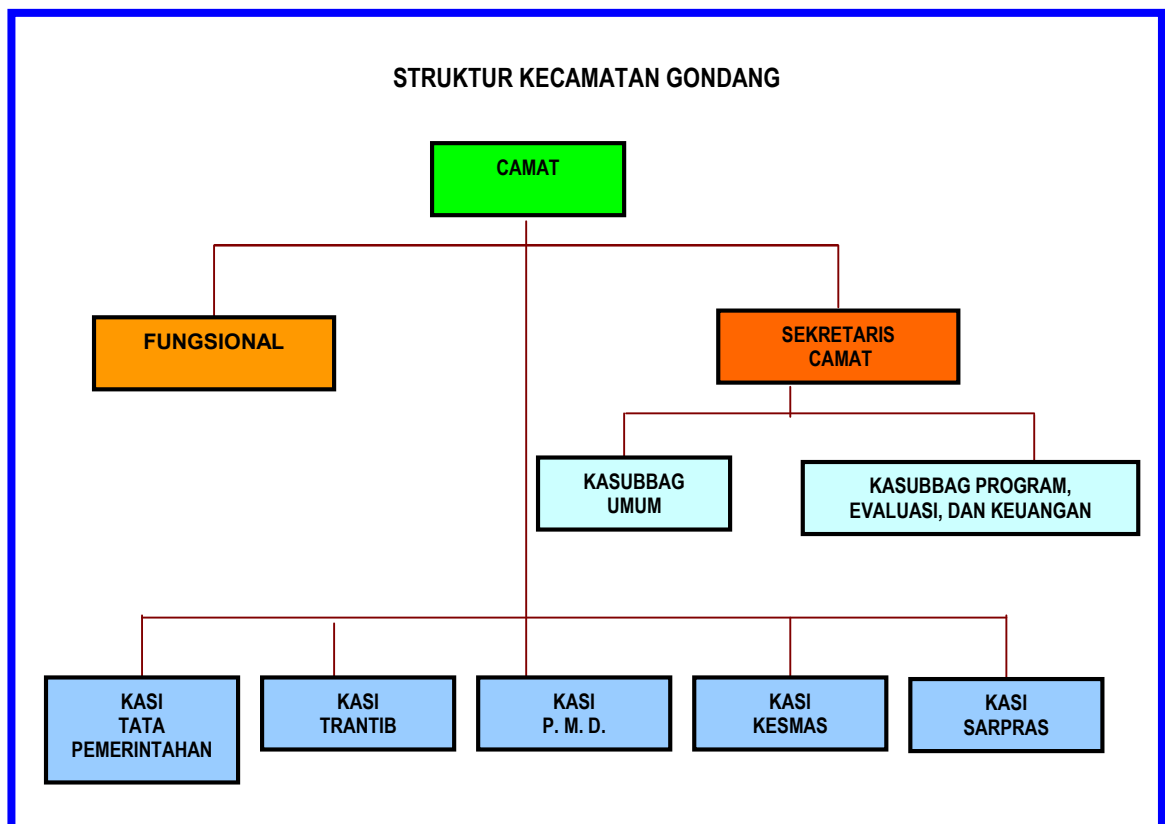
- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sekretariat, membawahi:
- a. Subbagian Umum;
Tugasnya :
 - a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
 - b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c) Mengurusi administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan
 - d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
 - e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
 - b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;
Tugasnya :
 - a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
 - b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan adalah:

- 1) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 2) Pengorganisasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 3) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- 5) Pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan
- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah
- 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan
- 8) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan
- 9) Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Keamanan Ketertiban

Seksi Keamanan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Keamanan Ketertiban, membina penyelenggaraan Keamanan Ketertiban desa dan/atau kelurahan.

Fungsi Seksi Keamanan Ketertiban adalah:

- 1) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan keamanan ketertiban
- 2) Pengorganisasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan keamanan ketertiban
- 3) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan bidang Keamanan Ketertiban di desa dan/atau kelurahan
- 5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Keamanan Ketertiban desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan
- 6) Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan Keamanan Ketertiban kecamatan dan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
- 7) Pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat
- 2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat
- 3) Pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB
- 4) Pemberian pertimbangan teknis pembetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi
- 5) Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan
- 6) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- 7) Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- 8) Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- 1) Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- 3) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- 4) Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Seksi Sarana Dan Prasarana

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana

Fungsi dari Seksi sarana dan prasarana adalah :

- 1) Pengekoordinasian dengan satuan ketja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana.
- 2) Pengekoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana
- 3) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana
- 4) Pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana
- 5) Pembuatan laporan penyelenggaran kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Kecamatan Gondang

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Gondang adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Gondang sebanyak 9 (Sembilan), sudah terisi sebanyak 8 (Delapan) jabatan struktural, dan 1 (satu) Jabatan Struktural Kosong pada Kasi Ketentraman dan Ketertiban, serta dibantu oleh 8 (delapan) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Gondang
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	4
4.	Kasubbag	2
5.	Staf/PNS	5
6.	THL	3
7.	Sekdes PNS	7
Jumlah		23

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Gondang sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Gondang
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	5
4.	Penata	III/c	3
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	3
6.	Penata Muda	III/a	2
7.	Pengatur Muda	II/b	8
Jumlah			20

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Gondang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Gondang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	3
2.	S1	7
3.	DIV	1
4.	D3	0
5.	SMA	11
6.	SMP	1
	JUMLAH	23

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
 - Roda empat 1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit Isuzu Panther Tahun 2014
 - Roda dua terdiri 3 (Tiga). Unit yaitu , Yamaha Vixion Tahun 2014, Honda Win Tahun 2007 dan Honda Supra-X Tahun 2011
3. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 20 buah
 - Meja layanan : 2 buah

- Kursi : 80 buah
- Bangku Panjang : 4 buah
- Komputer khusus KTP SIAK : 1 (satu) unit
- Komputer e-KTP : 2 (dua) unit
- Laptop : 1 (satu) unit
- Mesin Ketik : 1 (satu) buah
- Printer : 6 (Delapan) unit
- Telepon : 1 (satu) unit
- TV : 1 (satu) Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondang

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Gondang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
- Meningkatnya efektifitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondang
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran				415	450	410	515	558	430	485	385	530	693	103,6	107,7	93,90	102,91	124,93
2	Meningkatnya efektifitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara n pemerintahan desa/kelurahan				17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat				100	100	100	100	100	86	91	98	98	99	86	91	98	98	99
4	Meningkatnya efektifitaskoordinasi ketentraman dan ketertiban umum				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya sarana/prasarana laya fungsi				88	98	168	177	186	88	98	168	177	183	100	100	100	100	99,38

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “Jumlah Pelayanan Umum”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*excellent service*” (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gondang
Kabupaten Nganjuk

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	86.314.000	55.422.000	56.522.000	65.497.000	91.550.000	83.611.236	52.751.074	54.804.270	62.615.063	58.527.800	96,87	95,18	96,96	95,60	97,90	70.600.000	61.080.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	56.386.000	103.978.000	110.775.000	100.000.000	164.000.000	319.907.261	97.580.000	110.775.000	100.000.000	297.476.400	99,71	93,85	100	100	99,94	184.680.000	184.600.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.575.800	100	100	100	96,93	100	1.545.150	1.485.660
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	92.000.000	223.375.200	198.548.800	198.548.800	190.950.000	66.276.500	213.233.950	194.383.900	191.373.800	158.987.300	99,84	95,46	97,90	96,39	99,49	180.200.000	126.200

Sumber : LRA Kecamatan Gondang 2014-2018

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gondang, berikut ini dijelaskan kinerja pelayanan Kecamatan Gondang per seksi pelayanan yaitu :

1. Kinerja Pelayanan di Seksi Tata Pemerintahan :
 - a. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
 - b. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa/kelurahan;
 - c. Melakukan Perencanaan dan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa
 - d. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
 - e. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Gondang ;
 - f. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
 - g. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
 - h. Mengadakan Rapat koordinasi beserta Lurah, Kepala Desa, Sekretaris Desa se Kecamatan Gondang setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;
 - i. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
 - j. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Gondang ;
 - k. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa/kelurahan;
 - l. Pembinaan kelengkapan administrasi desa/kelurahan termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes,

dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa/kelurahan;

- m. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
- n. Pembinaan secara rutin ke desa/kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

2. Kinerja Pelayanan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

- a. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- b. Peningkatan dan perwujudan siskamling di desa, dusun sampai pada tingkat RT dan RW;
- c. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
- d. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
- e. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain: Operasi PKL, Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
- f. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- g. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
- h. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
- i. Melakukan Perencanaan dan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa

- j. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayondi desa/kelurahan.
- k. Mengadakan pekan panutan PBB di desa/kelurahan.
- l. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
- m. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);

3. Kinerja Pelayanan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
- b. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
- c. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa/kelurahan;
- d. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa/kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
- g. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Gondang ;
- h. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
- i. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- j. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
 - b. Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
 - c. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
 - d. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
 - e. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
 - f. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
 - g. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
 - h. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
 - i. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.
5. Kinerja Pelayanan di Seksi Sarana dan Prasarana
 - a. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan transportasi;
 - b. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
 - c. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
 - d. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
 - e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

- f. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gondang

2.4.1. Tantangan

- a. terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- b. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Gondang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- c. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- d. Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal
- e. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
- f. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
- g. Income perkapita masyarakat masih rendah.
- h. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
- i. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Gondang

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Gondang dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya kepercayaan diri pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Gondang untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan Gondang dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- d. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Gondang ;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- f. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Gondang , terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Gondang ;
- g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Gondang. Seperti Dana Desa (DD);

- i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Gondang. Seperti PKH/BLT dan RASKIN.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gondang

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Gondang menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Gondang ;
- 2) Pola kerja di Kecamatan Gondang yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 4) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Gondang ;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

- 3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
- 2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
- 5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Gondang ;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan Masalah
1	2	3	4	5
1	Kurang optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	kualitas pelayanan publik kepada masyarakat masih kurang	Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa belum memadai Sarana dan Prasarana Kantor masih kurang	Diselesaikan dengan strategi dan arah kebijakan
		tata kelola pemerintahan desa belum baik	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa kurang • Masih kurang terlaksananya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku 	Peningkatan sinergitas ditingkat kecamatan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kecamatan Gondang memiliki tugas dan fungsi yang jika dikaitkan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju

Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kuto) dan khususnya pada misi kedua, yaitu Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi tersebut adalah :

- a. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
- b. Meningkatkan sistem pelayanan publik;
- c. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Apabila ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka faktor penghambat pelayanan Kecamatan Gondang adalah regulasi yang masih kurang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Sedangkan faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah adalah adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Gondang termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

- a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Gondang sebagai pusat pengembangan kecamatan.
- b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Gondang termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder.

- c. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih
- d. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam
- e. Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat
- f. Kawasan peruntukan pertanian khususnya peternakan
- g. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Gondang menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa wilayah Kecamatan Gondang merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Gondang yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gondang telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Gondang, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan

adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian

pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kecamatan Gondang menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan Pemerintah Kecamatan Gondang dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah membawa implikasi yang besar terhadap arah dan kewenangan Pemerintah Kecamatan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan visi dan misi yang disesuaikan dengan ruang lingkup, program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kecamatan Gondang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini, memungkinkan Pemerintah Kecamatan Gondang mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Untuk itu, agar tujuan strategi dapat ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Adapun **Tujuan Strategi** Pemerintah Kecamatan Gondang adalah *meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan*, yang diukur dengan indikator

kinerja yaitu berupa *indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan*.

Sedangkan untuk tujuan strategi yang dimaksud, maka sasaran-sasaran yang diharapkan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Indikator : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan survey kepuasan masyarakat
- b. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Indikator : prosentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik

Adapun uraian diatas dapat dirangkum dalam table di bawah ini :

Tabel IV.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gondang 2018-2023

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	2450	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,08	83,2	83,4	83,5	83,6	83,7	83,7
					Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : 1. Pemerintahan 2. Pembangunan 3. Perekonomian 4. Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Kesejahteraan Sosial 6. Sarana prasarana	80%	82%	83 %	84 %	85 %	86 %	86%
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	90%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Gondang dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Gondang, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Gondang selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Gondang. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Gondang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Tabel VI.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa Surat-menyurat • Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik • Penyediaan alat tulis kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan • Penyediaan makanan dan minuman • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah • Monitoring, evaluasi dan pelaporan • Pengadaan Peralatan dan Bahan pembersih • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan perlengkapan gedung kantor • Pengadaan peralatan gedung kantor • Pengadaan mebeleur • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional • Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur • Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu • Pelaksanaan senam kesegaran jasmani 	Tersedianya pakaian olah raga dan kegiatan senam kesegaran jasmani
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemampuan teknis aparatur 	Terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan tugas pokok dan fungsinya
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD • Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran • Penyusunan Pelaporan Akhir tahun 	Tersusunnya dokumen laporan keuangan yang baik
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan • Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat • Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban • Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana 	Efektifitas koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)
	tramtib		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat • Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) • Pelestarian Nilai-nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan • Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah • Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan • Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan • Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan • Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan 	Prosentase Data dengan predikat evaluasi LPPD “baik”

Tabel VI.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kec Gondang
Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
									target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)						
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	1	20	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83	84	95,000	85	104,500	86	114,950	87	126,445	88	139,089,5	88	157,998,5	88	179,984,5	88	199,984,5	Sekretariat	Kec Gondang
			01	04	03	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 jenis	13.500	3 jenis	14.000	3 jenis	16.900	3 jenis	18.900	3 jenis	20.500	3 jenis	20.500						
						Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	20 jenis	20 jenis	10.000	20 jenis	10.000	20 jenis	12.000	20 jenis	13.000	20 jenis	14.000	20 jenis	14.000						
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	3 jenis	2.420	3 jenis	2.500	3 jenis	3.000	3 jenis	3.250	3 jenis	3.500	3 jenis	3.500						
			01	04	05	Penyediaan Komponen instalasi listrik	Jumlah komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis	5 Jenis	4.000	5 Jenis	4.000	5 Jenis	5.000	5 Jenis	5.500	5 Jenis	6.000	5 Jenis	6.000						
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	15 jenis	15 jenis	4.000	15 jenis	4.000	15 jenis	4.000	15 jenis	4.000	15 jenis	4.000	15 jenis	4.000						
						08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360 eksemplar	360 eksemplar	3.600	360 eksemplar	3.600	360 eksemplar	4.200	360 eksemplar	4.500	360 eksemplar	4.800	360 eksemplar	4.800						
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	240 Org/thn	240 Org/thn	28.000	240 Org/thn	35.000	240 Org/thn	38.000	240 Org/thn	41.000	240 Org/thn	44.000	240 Org/thn	44.000						
						Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah	15 kali	15 kali	22.500	15 kali	22.500	15 kali	12.000	15 kali	13.000	15 kali	14.000	15 kali	14.000						
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	168 kali	168 kali	4.000	168 kali	5.000	168 kali	7.000	168 kali	7.500	168 kali	8.000	168 kali	8.000						
						Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Jumlah alat dan bahan kebersihan	15 jenis	15 jenis	4.500	15 jenis	4.500	15 jenis	5.445	15 jenis	5.989,5	15 jenis	6.588	15 jenis	6.588						
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang	60%	61%	117,6	62%	129,3	64%	142,2	66%	156,5	68%	172,1	68%	171,959,	68%	171,959,	68%	171,959,	Sekretariat	Kec Gondang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Aparatur	laik fungsi			00		60		96		25		78,16		76		
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	5 Unit	5 Unit	15.000	5 Unit	17.500	5 Unit	29.000	5 Unit	32.000	5 Unit	35.000	5 Unit	35.000		
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	5 Unit	5 Unit	15.000	5 Unit	18.000	5 Unit	28.000	5 Unit	31.000	5 Unit	34.000	5 Unit	34.000		
				Pengadaan Mebeuler	Jumlah mebeuler	5 Unit	5 Unit	20.000	5 Unit	18.000	5 Unit	27.000	5 Unit	29.000	5 Unit	31.000	5 Unit	31.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	6 Jenis	6 Jenis	15.000	6 Jenis	17.900	6 Jenis	19.000	6 Jenis	21.000	6 Jenis	23.000	6 Jenis	23.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	4 Jenis	4 Jenis	22.000	4 Jenis	35.000	4 Jenis	32.000	4 Jenis	34.000	4 Jenis	36.000	4 Jenis	36.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	6 Kegiatan	6 Kegiatan	7.500	6 Kegiatan	8.500	6 Kegiatan	11.500	6 Kegiatan	13.000	6 Kegiatan	14.500	6 Kegiatan	14.500		
			1 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	6,500	100%	7,150	100%	7,865	100%	8,651,5	100%	9,516,65	100%	39,683,15	Sekretariat	
				Penyusunan pelaporan Capaian Kinerja, dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD dan Laporan Triwulanan 1 s/d 4	2 Jenis dok	2 Jenis dok	2.000	2 Jenis dok	1.000	2 Jenis dok	2.420	2 Jenis dok	2.662	2 Jenis dok	2.928,2	2 Jenis dok	2.928,2		
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	500	2 Dokumen	1.000	2 Dokumen	1.815	2 Dokumen	1.996,5	2 Dokumen	2.196,15	2 Dokumen	2.196,15		
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000	1 Dokumen	1.500	1 Dokumen	3.630	1 Dokumen	3.993	1 Dokumen	4.392,3	1 Dokumen	4.392,3		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	90%	91%	14,100	92%	15,510	93%	17,061	94%	18,767,1	95%	20,643,81	95%	86,081,91		
				Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	Jumlah kegiatan senam kesegaran jasmani	60 kali	60 kali	9.600	60 kali	3.600	60 kali	11.616	60 kali	12.776	60 kali	14.055,36	60 kali	14.055,36		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	4.500	1 Jenis	4.500	1 Jenis	5.445	1 Jenis	5.989,5	1 Jenis	6.588,45	1 Jenis	6.588,45		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	15,000	100%	16,000	100%	17,000	100%	18,000	100%	19,000	100%	85,000		
				Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah pegawai yang meningkat kualifikasi dan kompetensi dalam bidang penguasaan tugas pokok dan fungsinya	2 keg	2 keg	15.000	2 keg	5.000	2 keg	17.000	2 keg	18.000	2 keg	19.000	2 keg	19.000		
	Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang : Pemerintahan, Kesra, Trantibum, dan pemberdayaan masyarakat	1 20 50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	90%	100%	172,380	100%	189,618	100%	208,579,8	100%	229,437,78	100%	252,381,558	100%	1,052,397,138	Sekretariat	Kec. Gondang
			1 01 05 01	Koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan	Jumlah data profil/monografi Kecamatan yang tersusun	1 keg	1 keg	9,000	1 keg	9,900	1 keg	10,890	1 keg	11,979	1 keg	13,176,9	1 keg	13,176,9		
					- Jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang tersusun	12 laporan	12 laporan	15,000	12 laporan	16,000	12 laporan	17,000	12 laporan	17,000	12 laporan	18,000	12 laporan	19,000		
					- Jumlah publikasi kegiatan kecamatan	3 kali	3 kali	2.000	3 kali	2.000	3 kali	2.000	3 kali	2.000	3 kali	2.000	3 kali	2.000		
				Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat yang tersusun	12 laporan	12 laporan	23,000	12 laporan	20,000	12 laporan	27,830	12 laporan	30,613	12 laporan	33,674,3	12 laporan	33,674,3		
				Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah laporan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang tersusun	12 laporan	12 laporan	19,730	12 laporan	16,000	12 laporan	23,873,3	12 laporan	26,260,63	12 laporan	28,886,693	12 laporan	28,886,693		
				Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana yang tersusun	12 laporan	12 laporan	10,000	12 laporan	10,000	12 laporan	12,100	12 laporan	13,310	12 laporan	14,641,	12 laporan	14,641		
				Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	12 laporan	12 laporan	10,000	12 laporan	20,000	12 laporan	12,100	12 laporan	13,310	12 laporan	14,641,	12 laporan	14,641		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah program PKK yang terfasilitasi	12 keg	12 keg	15.000	12 keg	15.000	18.150	12 keg	19.965,5	12 keg	21.961,5	12 keg	21.961,5	12 keg		
				Pelestarian Nilai-Nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan Hari Besar Daerah, Nasional, dan Peringatan Keagamaan yang dilaksanakan	8 keg	8 keg	40.000	8 keg	20.000	48.400	8 keg	53.240	8 keg	58.564	8 keg	58.564	8 keg		
				Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Jumlah desa/kelurahan lunas PBB P2 tepat waktu	17 Desa	17 Desa	31.650	17 Desa	35.000	38.296,5	17 Desa	42.126,15	17 Desa	46.338,765	17 Desa	46.338,765	17 Desa		
				Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang terlayani	1.000 layanan	1.000 layanan	25.000	1.000 layanan	10.000	27.000	1.000 layanan	28.000	1.000 layanan	29.000	1.000 layanan	30.000	1.000 layanan		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Presentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik		Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan	50%	75%	99,200	90%	109,120	100%	120,032	100%	132,035,2	100%	145,238,72	100%	605,625,92		
			1 01 07 01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset, dan pertanggung jawaban desa	4 keg	5 keg	39,500	4 keg	10,000	4 keg	47,795	4 keg	52,574,5	4 keg	57,831,95	4 keg	57,831,95		
					-Tertib administrasi	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa			
					-Menyusun APB Desa	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa			
					-Menyusun LPPD, LKPPD, IPPD	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa			
					-Menyusun PKT, LPT	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa			
				Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan data desa	4 Keg	4 keg	25,000	4 keg	25,000	4 keg	32,670	4 keg	35,937	4 keg	39,530,7	4 keg	39,530,7		
					-Melaksanakan Musrenbang	17 keg	6,500				7,865	17 keg	8,651,5	17 keg	9,516,65	17 keg	9,516,65			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					-Menyusun profil desa	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa				
					-Menyusun RPJM Desa dan RKP Desa	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa				
					-Melaksanakan verifikasi dan validasi BDT	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa				
					Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	5 keg	5 keg	25,200	5 keg	7.500	5 keg	30,492	5 keg	33,541,2	5 keg	36,895,32	5 keg	36,895,32		
					-Menyusun dan menyampaikan laporan kejadian	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa				
					- Membentuk Desa tangguh bencana	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa				
					-Melaksanakan pembinaan Linmas	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa				
					-Tertib administrasi lembaga kemasyarakatan	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa				
					-Meningkat swadaya/partisipasi/gotong royong masyarakat	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 Desa				
					Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Fasilitas kerjasama antar desa	3 keg	3 keg	7,500	3 keg	7.500	3 keg	9,075	3 keg	9,982,5	3 keg	10,980,75	3 keg	10,980,75		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dari dokumen ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Dan adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Gondang adalah “Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan”.

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Gondang

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun -0 2018	Tahun -1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan	N/A	2350	2375	2400	2425	2450	2450

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari kecamatan Gondang sebagaimana table di bawah

Tabel VII.2
Indikator Kinerja Kunci Kantor Kecamatan Gondang

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun -1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan masyarakat	Hasil SKM Pelayanan Kecamatan	83	84	85	86	87	88	88
2	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	$\frac{\Sigma \text{ Sarana dan prasarana layak fungsi}}{\Sigma \text{ Sarana dan prasarana}} \times 100\%$	60 %	61%	62%	63%	64%	65%	65%
3	Tingkat kehadiran ASN	$\frac{\Sigma \text{ kehadiran ASN}}{\Sigma \text{ ASN}} \times 100\%$	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
4	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\Sigma \text{ laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu}}{\Sigma \text{ laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase pegawai dengan kategori Nilai SKP “Baik”	$\frac{\Sigma \text{ ASN dengan Nilai SKP “Baik”}}{\Sigma \text{ ASN}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$\frac{\Sigma \text{ Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ Jumlah seluruh koordinasi}} \times 100\%$	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tingkat efektifitas pembinaan desa/kelurahan	$\frac{\Sigma \text{ Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ Seluruh pembinaan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

CAMAT GONDANG

IDA SHOBIHATIN,AP,M.Si.
Pembina
NIP.19570116 199412 2 001